



LAPORAN SURVEI

INDEKS PERSEPSI KORUPSI (IPK)

RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM
PROVINSI KALIAMANTAN TIMUR



TAHUN
2024

0541-743364



<https://rsjdahm.kaltimprov.go.id/>



rsjdahm@gmail.com



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum.....	4
1.3 Tujuan.....	5
1.4 Ruang Lingkup.....	5
BAB II. METODE PELAKSANAAN SURVEI	6
2.1. Metode Pelaksanaan Survei	6
2.2. Populasi dan Sampel.....	6
2.3. Pengumpulan Data	9
2.4. Waktu Pelaksanaan Survei	9
2.5. Pengolahan dan Analisis Data	9
BAB III. HASIL SURVEI PERSEPSI KORUPSI	12
3.1. Karakteristik Masyarakat Pengguna Layanan Kesehatan.....	12
3.2. Hasil Perhitungan Survei	14
3.3. Distribusi Persepsi Korupsi Menurut Jenis Pasien.....	19
BAB IV. PEMBAHASAN	29
BAB V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	33
LAMPIRAN	35
1. Hasil Survei IPK	35
2. Tim Survei Internal	36
3. Kuesioner IPK	38
4. Dokumentasi Terkait Pelaksanaan IPK	39

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBR dan WBBM), Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik. Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2015 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Istilah Korupsi berasal dari bahasa latin yakni corruption, dalam bahasa Inggris disebut corruption atau corrupt, dalam bahasa Perancis disebut corruption dan dalam bahasa Belanda disebut dengan corruptie. Korup berarti busuk, buruk; suka menerima uang sogok (memakai kekuasaannya untuk kepentingan sendiri dan sebagainya) (Setiadi, 2018).

Praktek penyalahgunaan tersebut dapat terjadi di berbagai level dari birokrasi dan sistem pemerintahan. Tindakan korupsi masuk dalam kategori isu nasional yang menjadi masalah besar untuk negara Indonesia karena merugikan negara dan warga negara. Berbagai kajian mengemukakan bahwa korupsi memiliki dampak buruk bagi berbagai sumber daya politik, ekonomi, maupun sosial.

Korupsi disnyalir telah ada untuk waktu yang sangat lama dan tetap berpotensi akan ada di masa depan kecuali jika pemerintah dan segenap warga negara dapat menemukan cara yang efektif untuk memeranginya. Istilah Korupsi berasal dari bahasa latin yakni corruption, dalam bahasa Inggris disebut corruption atau corrupt, dalam bahasa Perancis disebut corruption dan dalam bahasa Belanda disebut dengan corruptie. Korup berarti busuk, buruk; suka menerima uang sogok (memakai kekuasaannya untuk kepentingan sendiri dan sebagainya) (Setiadi, 2018). Praktek penyalahgunaan tersebut dapat terjadi di berbagai level dari birokrasi dan sistem pemerintahan.

Tindakan korupsi masuk dalam kategori isu nasional yang menjadi masalah besar untuk negara Indonesia karena merugikan negara dan warga negara. Berbagai kajian mengemukakan bahwa korupsi memiliki dampak buruk bagi berbagai sumber daya politik, ekonomi, maupun sosial. Korupsi mampu dengan segera menggerogoti kualitas institusi dan kepercayaan sosial, memperburuk kualitas demokrasi, kebebasan dan keterbukaan publik. Melalui Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), program yang dimandatkan oleh Presiden Republik

Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden No 54/2018 dan telah melahirkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 5 Menteri yang ditandatangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB), Kementerian Dalam Negeri, Kantor Staf Presiden dan Bappenas. Strategi tersebut tertuang dalam 12 aksi yang juga meliputi bidang kesehatan.

Korupsi, dalam segala bentuknya, merupakan penyumbang yang sangat besar termasuk dalam pelayanan kesehatan salah satunya terhadap kualitas perawatan yang buruk. Apakah itu terjadi secara sporadis atau menjadi institusional, dampaknya dirasakan melalui waktu tunggu yang lebih lama, perawatan yang lebih buruk oleh petugas kesehatan, ancaman terhadap rantai pasokan, biaya layanan yang lebih tinggi yang seharusnya gratis, dan penyalahgunaan dana secara umum. Malpraktik ini menyebabkan menurunnya kepercayaan pada pemerintah dan sistem pelayanan kesehatan, serta penurunan kualitas perawatan dan hasil kesehatan yang memburuk (National Academies of Sciences Engineering and Medicine, 2018).

Persepsi korupsi merupakan penafsiran dan penilaian seseorang terhadap fenomena sosial. Persepsi korupsi diukur melalui beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan tindakan korupsi. Penilaian persepsi korupsi dalam tulisan ini diterapkan di fasilitas kesehatan, yaitu Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini merupakan langkah evaluasi dan preventif, karena dengan

mengidentifikasi persepsi korupsi oleh masyarakat yang terkait dengan pelayanan yang diberikan akan sangat membantu dalam mengawasi dan mengendalikan keberadaan praktik korupsi bila terjadi di Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur Persepsi korupsi penting untuk diketahui dimaksud tidak hanya secara subjektif, namun juga secara objektif yang didasarkan dari pengalaman secara langsung ataupun tidak langsung. Persepsi korupsi dianggap sebagai fenomena budaya, karena, sangat bergantung pada bagaimana masyarakat memahami aturan yang telah ditetapkan, serta tidak hanya bergantung pada masyarakat tetapi juga pada nilai-nilai pribadi dan moral.

1.2 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Negara RI Nomor 3952).
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2019 tentang Perubahan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah

Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

1.3 Tujuan

Mengetahui gambaran tindakan-tindakan yang termasuk dalam korupsi di srtiap instalasi pelayanan dan menjadi pertimbangan dalam memberikan upaya pencegahan dan pemerantasan korupsi di tingkat pelayanan kesehatan.

1.4 Ruang Lingkup

Berbagai pertanyaan telah diajukan kepada masyarakat untuk mengetahui indeks persepsi korupsi yang terdiri dari unsur yang relevan, valid dan reliabel dengan harapan masyarakat memberikan pendapatnya terhadap empat pilihan jawaban yang tersedia (kuesioner terlampir).

BAB II

METODE PELAKSANAAN SURVEI

2.1. Metode Pelaksanaan Survei

Data dan informasi diperoleh dalam survei ini dari data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner yang diperoleh melalui tanya jawab langsung antara pewawancara dengan pengguna layanan Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam. Kuesioner yang disusun berisi daftar pertanyaan kepada masyarakat pengguna layanan kesehatan dan diharapkan masyarakat pengguna layanan kesehatan bersedia merespon daftar pertanyaan tersebut. Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini merupakan kuesioner tertutup karena alternatif jawaban telah disediakan.

Survei Indeks Persepsi Korupsi (IPK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam survei tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam survei.

2.2. Populasi dan Sampel

Populasi sumber yang menjadi tujuan generalisasi hasil survei adalah seluruh pasien atau keluarga pasien yang mendapatkan pelayanan di RSJD Atma Husada Mahakam baik pasien baru atau pertama kali memanfaatkan

pelayanan maupun pasien yang telah berulang kali mendapatkan pelayanan kesehatan. Dengan teknik pengambilan sampel accidental sampling yang merupakan penarikan sampel yang dilakukan pada mereka yang pada saat pengambilan data dilakukan berada di RSJD Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur.

Rumus yang digunakan dalam menentukan besar sampel ialah estimasi rata-rata populasi berdasarkan rumus Lemeshow, Hosmer, Klar, & Lwanga (1997).

$$n = \frac{Z_{1-\frac{\alpha}{2}}^2 \sigma^2}{d^2}$$

Keterangan:

n : Jumlah responden

$Z_{1-\frac{\alpha}{2}}$: Tingkat kepercayaan/*Confidence Level*, dalam penelitian ini 95% = 1,96

σ : Standar deviasi populasi

P : Proporsi

d : Tingkat kesalahan/*Margin of Error* = 5% = 0,05

Dengan rumus di atas maka hasil besar sampel yang diperoleh adalah 100 responden.

Kriteria responden yang dapat mengikuti survei ini sebagai berikut :

1. Masyarakat pengguna layanan kesehatan Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur.
2. Berusia minimal 17 tahun.

3. Dapat berkomunikasi verbal dengan baik.
4. Bersedia menjadi responden dalam survei.

2.3. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan oleh pencacah melalui wawancara terstruktur menggunakan kuesioner. Kuesioner wawancara ini dilakukan secara online, yang dapat diakses melalui bit.ly/IPKATMA2024.

2.4. Waktu Pelaksanaan Survei

Survei dilakukan secara periodik dengan jangka waktu (periode) tertentu yaitu 1 (satu) tahun. Penyusunan indeks persepsi korupsi memerlukan waktu selama 6 (enam) bulan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1. Jadwal Pelaksanaan IPK

No.	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Hari Kerja
1.	Persiapan	Januari 2024	5
2.	Pengumpulan Data	Februari – Mei 2024	68
3.	Pengolahan Data dan Analisis Hasil	Juni 2024	5
4.	Penyusunan dan Pelaporan Hasil	Juni 2024	7

2.5. Pengolahan dan Analisis Data

Analisa data pada survei dilakukan dengan mendistribusikan karakteristik masyarakat pengguna layanan kesehatan berdasarkan jenis kelamin, umur, domisili, pendidikan, dan pekerjaan dan sebaran atau distribusi frekuensi terhadap masing-masing unsur persepsi korupsi.

Hasil survei persepsi korupsi terhadap pelayanan publik di RSJD Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022 dihitung dari jumlah nilai mean dari setiap unit pelayanan dan nilai indeks gabungan

untuk setiap unsur persepsi korupsi. Indeks Persepsi Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Setiap unsur penilaian persepsi terdiri dari 4 pilihan dengan konversi nilai 1, 2, 3 dan 4.
2. Jumlah nilai total persepsi korupsi dijumlahkan dan dianalisis sebagai Indeks Persepsi Korupsi

Nilai Persepsi Tiap Unsur

$$= \frac{\text{Jumlah Total Nilai Persepsi Tiap Unsur}}{\text{Jumlah Masyarakat pengguna layanan kesehatan}}$$

$$\text{Nilai Persepsi Korupsi: } \frac{\text{Nilai Persepsi Korupsi Tiap Unsur}}{3}$$

Skala indeks persepsi korupsi antara 0 – 13, yang artinya mendekati nilai 13 maka persepsi korupsi makin baik.

Berikut adalah unsur indeks persepsi korupsi yang diukur dalam survei:

1. **Suap**, yaitu ada atau tidaknya praktik suap untuk memperlancar/mendapatkan pelayanan ekstra
2. **Penggelapan**, yaitu ada atau tidaknya tarif pelayanan yang ditagihkan tidak sesuai dengan ketentuan atau informasi yang berlaku.
3. **Pemerasan**, yaitu ada atau tidaknya upaya mempersulit oleh petugas apabila tidak diberikan imbalan tertentu diluar tariff yang telah ditetapkan.
4. **Perbuatan curang**, yaitu ada atau tidaknya penggelapan biaya melalui pembebanan biaya lain yang tidak benar-benar dilakukan.

5. **Hadiah/ gratifikasi**, yaitu ada atau tidaknya praktik pemberian hadiah atau barang setelah memberikan pelayanan.

BAB III

HASIL SURVEI PERSEPSI KORUPSI

3.1. Karakteristik Masyarakat Pengguna Layanan Kesehatan

Masyarakat yang berpartisipasi dalam survei Indeks Persepsi Korupsi RSJD Atma Husada Mahakam berasal dari latar belakang yang variatif dari berbagai latar belakang. Berikut Gambaran karakteristik masyarakat pengguna layanan kesehatan disajikan sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Distribusi Masyarakat pengguna layanan kesehatan

Menurut Karakteristik Demografi, Jenis Pasien dan Jenis Pelayanan

Karakteristik Demografi (n=200)	
Usia, M ± SD	37,89 ± 12,11
Jenis Kelamin, (n%)	
Laki-laki	71 (35,5)
Perempuan	129 (64,5)
Pendidikan Terakhir, (n%)	
Tidak Sekolah	19 (9,5)
SD/Sederajat	18 (9)
SMP/Sederajat	16 (8)
SMA/Sederajat	86 (43)
Diploma (DI, DII, DIII)	19 (9,5)
Sarjana (S1/DIV)	39 (19,5)
Pasca Sarjana (S2/S3)	3 (1,5)
Alamat, (n%)	
Balikpapan	4 (2)
Berau	1 (0,5)
Bontang	1 (0,5)
Kutai Kartanegara	22 (11)
Kutai Timur	2 (1)
Kutai Barat	3 (1,5)
Mahakam Ulu	1 (0,5)
Paser	0 (0)
Penajam Paser Utara	0 (0)

Samarinda	165 (82,5)
Lainnya	1 (0,5)
Pekerjaan, (n%)	
ASN/BUMN/TNI/POLRI	19 (9,5)
Pegawai Pemerintah Non ASN	6 (3)
Karyawan Swasta	46 (23)
Wiraswasta/Usahawan	11 (5,5)
Petani/Nelayan/Pekebun	5 (2,5)
Pedagang	6 (3)
Pelajar/Mahasiswa	13 (6,5)
Tidak Bekerja (Termasuk Ibu Rumah Tangga)	93 (46,5)
Pensiunan	1 (0,5)
Lainnya	0 (0)
Jenis Pelayanan, (n%)	
Klinik Geriatri	4 (2)
Klinik Psikologi	7 (3,5)
Klinik NAPZA	1 (0,5)
Klinik Psikiatri	85 (42,5)
Klinik Gigi dan Mulut	2 (1)
Klinik Tumbuh Kembang	33 (16,5)
Klinik Fisioterapi	3 (1,5)
Klinik Psikometri	2 (1)
IGD	0 (0)
MCU	3 (1,5)
Klinik Penyakit Dalam	1 (0,5)
Klinik Umum	1 (0,5)
Klinik Spesialis Anak dan Remaja	20 (10)
Klinik Elektromedik	0 (0)
Rehab Psikososial	10 (5)
Farmasi	4 (2)
Rawat Inap	24 (12)
Jenis Pembayaran Pasien, (n%)	
JKN (BPJS, KIS, BPJS Tenaga Kerja)	170 (85)
Asuransi Komersial (contoh BNI Life)	0 (0)
Coorporate/Perusahaan	0 (0)
Mandiri	30 (15)
Jenis Pasien, (n%)	
Pasien Baru	45 (22,5)
Pasien Lama	155 (77,5)
Rata-rata lama memanfaatkan pelayanan (tahun)	1,10

Tabel 3.1 menggambarkan rata-rata usia masyarakat pengguna layanan kesehatan berkisar 37 tahun dengan standar deviasi 12,11 tahun. Lebih dari separuh responden adalah perempuan (64,5%). Masyarakat yang ikut dalam survei ini memiliki latar belakang pendidikan yang bervariasi, kebanyakan dari mereka adalah lulusan SMA/SLTA (43%).

Pemanfaatan pelayanan di RSJD Atma Husada Mahakam tersebar di Kalimantan Timur dan beberapa dari luar daerah Kalimantan, mayoritas masyarakat pengguna berasal dari Samarinda (82,5%) selanjutnya proporsi tertinggi kedua berasal dari 11 persen adalah masyarakat Kutai Kartanegara.

Jika ditinjau dari jenis pekerjaan, hampir separuh masyarakat pengguna layanan kesehatan tidak bekerja (46,5%) dan sebagian besar masyarakat bekerja sebagai karyawan swasta (23%). Hampir seluruh masyarakat pengguna layanan kesehatan memanfaatkan pelayanan di Instalasi Psikiatri (42,5%), sebesar 16,5 persen dari Instalasi Tumbuh Kembang. Serta mayoritas responden menggunakan asuransi JKN (BPJS, KIS, BPJS Tenaga Kerja) sebesar 85 persen.

Bila ditinjau berdasarkan jenis pasien, terdapat 77,5 persen yang merupakan pasien lama dan 22,5 persen sisanya merupakan pasien baru, dengan rata-rata lama memanfaatkan pelayanan 1 tahun.

3.2. Hasil Perhitungan Survei

Berikut adalah hasil perhitungan Indeks Persepsi Korupsi yang ditinjau dari duabelas unsur persepsi korupsi:

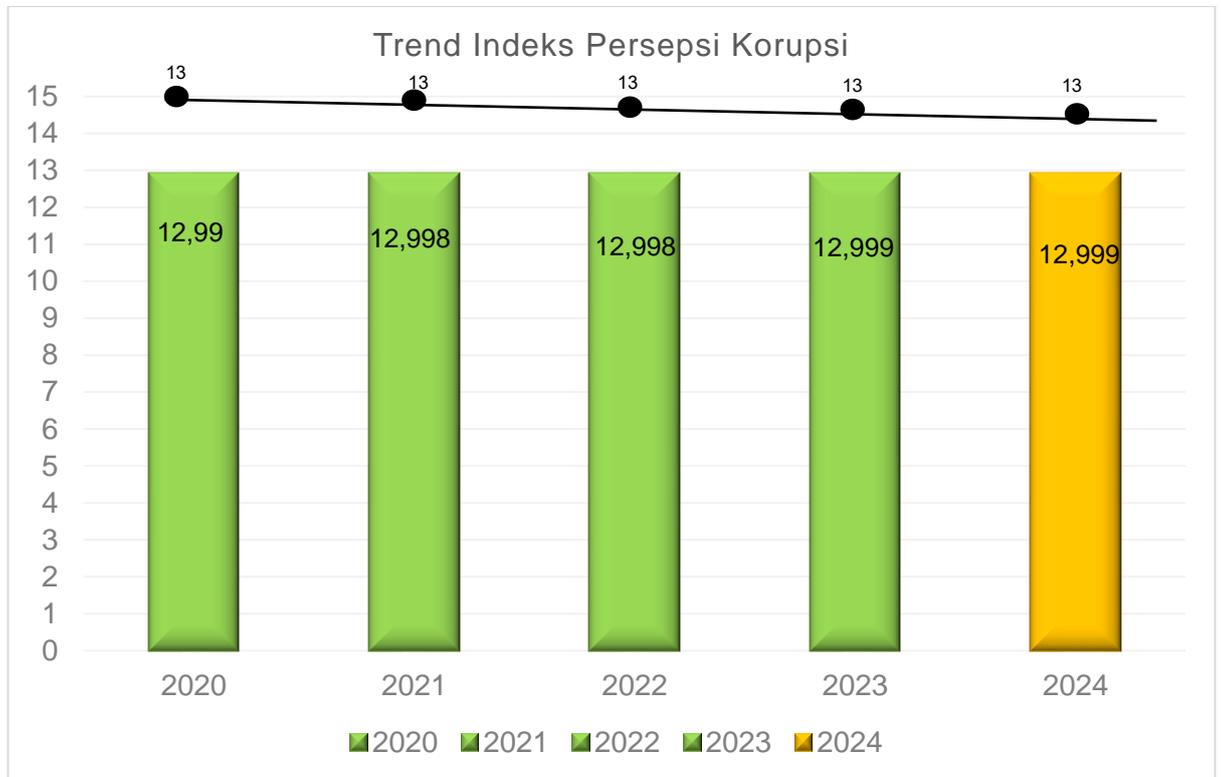
Tabel 3. 2 Nilai rata-rata berdasarkan Unsur Persepsi Korupsi

No.	Unsur IPK	Total Skor	NRR/Unsur	Unsur Yang Terjawab
1.	Budaya Praktek Korupsi	798	4,00	200
2.	Pengalaman Memberikan Tanda Terima Kasih Kepada Petugas	795	4,00	200
3.	Terdapat Informasi Adanya Oknum-Oknum Yang Melakukan Praktek Korupsi	800	4,00	200
4.	Menerima/Meminta Imbalan Di Luar Ketentuan Yang Berlaku	800	4,00	200
5.	Pernah Dipersulit Oleh Petugas Meskipun Persyaratan Layanan Telah Terpenuhi	800	4,00	200
6.	Pemberian Layanan Diluar Prosedur/Kecurangan Pelayanan	800	4,00	200
7.	Terdapat Praktek Percaloan	799	4,00	200
8.	Kesesuaian Antara Produk /Layanan Diterima Dengan Yang Diminta	800	4,00	200
9.	Petugas Bekerja Tanpa Membedakan Pasien/Keluarga Pasien	800	4,00	200
10.	Membayar Sejumlah Uang Selain Pembayaran Dikasir	799	4,00	200
11.	Petugas Memberikan Perlakuan Istimewa Tanpa Mengantri)	792	4,00	200
12.	Adanya Pungli (Pengutan Liar)	800	4,00	200
13.	Adanya Biaya Tambahan Untuk Keperluan Rumah Sakit	800	4,00	200
			IPK	
			12,999	

Tabel 3.2 memberikan informasi bahwa mayoritas nilai IPK di RSJD Atma Husada Mahakam sebesar 12.999 yang berarti semakin mendekati skor 13, maka persepsi korupsi berindikasi makin baik. Nilai ini sangat baik bagi RSJD Atma Husada Mahakam karena mencapai institusi bebas korupsi dari persepsi seluruh masyarakat yang terlibat dalam survei ini.

Berikut tren nilai IPK Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada

Mahakam Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024:



Gambar 3. 1. Trend Indeks Persepsi Korupsi Masyarakat RSJD Atma Husada Mahakam Tahun 2020-2024

Terdapat tiga belas unsur atau seluruh unsur memiliki nilai IPK mencapai skor 4.00 (skala 0 sampai 4) atau berada pada nilai yang tertinggi atau maksimal, diantaranya:

1. Tidak terdapat Budaya praktek korupsi
2. Tidak memiliki pengalaman memberikan tanda terima kasih kepada petugas
3. Tidak terdapat informasi adanya oknum-oknum yang melakukan praktek korupsi
4. Tidak menerima/ meminta Imbalan di luar ketentuan yang berlaku
5. Tidak pernah dipersulit oleh petugas terkait persyaratan layanan
6. Tidak adanya pelayanan diluar prosedur/ kecurangan pelayanan
7. Tidak terdapat Praktek Percaloan

8. Kesesuaian produk layanan / Layanan Diterima Dengan Yang Diminta
9. Petugas bekerja tanpa membedakan pasien/ keluarga pasien
10. Tidak ada keharusan membayar sejumlah uang selain pembayaran dikasir
11. Petugas tidak memberikan perlakuan istimewa / tanpa mengantri
12. Tidak adanya kegiatan pungutan liar (Pungli)
13. Tidak adanya Biaya Tambahan Untuk Keperluan Rumah Sakit

Tabel 3. 3 Distribusi Persepsi Masyarakat pengguna layanan kesehatan terhadap Persepsi Korupsi

No	Pertanyaan	Selalu		Pernah Beberapa Kali		Pernah Sekali		Tidak Pernah	
		n	%	n	%	n	%	n	%
1	Berdasarkan pengalaman Bapak/ibu/Sd. RSJD Atma Husada Mahakam terdapat budaya dan praktek korupsi dalam pelayanan kesehatan	0	0	0	0	2	1	200	100
2	Berdasarkan pengalaman. Bapak/ibu/Sdr pernah memberikan tanda terima kasih atas pelayanan yang telah diselesaikan oleh RSJD Atma Husada Mahakam (meskipun tidak diminta). baik dalam bentuk barang ataupun uang.	0	0	1	0,5	3	1,5	200	100
3	Berdasarkan pengalaman. Bapak/ibu/Sdr pernah mendapatkan informasi dari teman/kerabat yang menyatakan bahwa di RSJD Atma Husada Mahakam terdapat oknum-oknum petugas yang melakukan praktek korupsi	0	0	0	0	0	0	200	100

4	Petugas pernah menerima/meminta imbalan untuk alasan administrasi. rokok dll di luar ketentuan yang berlaku pada unit layanan RSJD Atma Husada Mahakam	0	0	0	0	0	0	200	100
5	Bapak/ibu/Sdr pernah pernah dipersulit oleh petugas RSJD Atma Husada Mahakam(walaupun sudah memenuhi persyaratan layanan) untuk mendapatkan layanan RSJD Atma Husada Mahakam dan terindikasi dugaan petugas tersebut menghendaki imbalan (uang atau barang) tertentu	0	0	0	0	0	0	200	100
6	Petugas RSJD Atma Husada Mahakam ada memberikan pelayanan diluar prosedur/ kecurangan pelayanan pada unit layanan RSJD Atma Husada Mahakam.	0	0	0	0	0	0	200	100
7	Dalam proses pelayanan di RSJD Atma Husada Mahakam terdapat praktek percaloan/ perantara tidak resmi pada unit layanan RSJD Atma Husada Mahakam.	0	0	0	0	1	0,5	200	100
8	Berdasarkan pengalaman. produk /jasa layanan yang diterima tidak sesuai dengan daftar produk.jasa layanan yang tersedia/ diminta	0	0	0	0	0	0	200	100
9	Petugas memberikan pelayanan	0	0	0	0	0	0	200	100

	secara khusus/ membeda-bedakan pelayanan (factor suku. agama dll)								
10	Bapak/Ibu/Sdr pernah membayar sejumlah uang selain pembayaran dikasir RSJD Atma Husada Mahakam	0	0	0	0	1	0,5	200	100
11	Dokter/perawat/petugas kesehatan di RSJD Atma Husada Mahakam pernah membiarkan teman/ kerabatnya mendapatkan pelayanan tanpa mengantri.	0	0	0	0	2	1	198	99
12	Di RSJD Atma Husada Mahakamt terdapat pungutan liar (pungli) seperti permintaan pembayaran diluar kasir selama Bapak/Ibu/Sdr memanfaatkan pelayanan di unit ini.	0	0	0	0	0	0	200	100
13	Apakah bapak/ ibu/ sdr pernah ditawarkan membayar sejumlah uang tambahan untuk membeli alat kesehatan dan obat diluar pelayanan yang diberikan petugas dan tidak dibayarkan di kasir	0	0	0	0	0	0	200	100

Tabel 3.3 menggambarkan bahwa dari 13 unsur tersebut didapatkan satu unsur yang perlu mendapatkan perhatian, yaitu unsur Persepsi terhadap petugas memberikan perlakuan istimewa (tanpa mengantri) dimana ditemukan 2 orang pasien lama yang merasakan perlakuan Istimewa pada saat mengantri di RSJD Atma Husada Mahakam.

3.3. Distribusi Persepsi Korupsi Menurut Jenis Pasien

Hasil survei yang diuraikan dalam setiap unsur pertanyaan di RSJD Atma Husada Mahakam Samarinda dan uraian berikut berdasarkan jenis pasien (baru 45 orang dan lama 155 orang).

1. Persepsi Terhadap Budaya Praktek

Berikut adalah sebaran jawaban masyarakat pengguna layanan kesehatan mengenai budaya praktek korupsi menurut jenis pasien:

Tabel 3.4 Distribusi masyarakat pengguna layanan kesehatan berdasarkan pengalaman di RSJD AHM Samarinda terdapat budaya dan praktek korupsi dalam pelayanan kesehatan

Jenis Pasien	Pendapat							
	Selalu	%	Pernah Beberapa Kali	%	Pernah Sekali	%	Tidak Pernah	%
Pasien Baru	0	0	0	0	0	0	45	22,5
Pasien Lama	0	0	0	0	0	0	155	77,5
Jumlah Responden	0	0	0	0	0	0	198	100

Tabel 3.4 memperlihatkan bahwa seluruh masyarakat pengguna layanan kesehatan terdapat pasien lama maupun pasien baru menyatakan tidak pernah mendapatkan budaya dan praktek korupsi dalam pelayanan yang ada di RSJD Atma Husada Mahakam.

2. Persepsi Terhadap Pengalaman Memberikan Tanda Terima Kasih Kepada Petugas

Berikut merupakan distribusi jawaban masyarakat pengguna layanan kesehatan mengenai pengalaman memberikan tanda terima kasih kepada petugas menurut jenis pasien:

Tabel 3.5 Distribusi masyarakat pengguna layanan kesehatan berdasarkan pengalaman pernah memberikan tanda terima kasih atas pelayanan yang telah diselesaikan oleh RSJD Atma Husada Mahakam Samarinda (meskipun tidak diminta), baik dalam bentuk barang ataupun uang

Jenis Pasien	Pendapat							
	Selalu	%	Pernah Beberapa Kali	%	Pernah Sekali	%	Tidak Pernah	%
Pasien Baru	0	0	0	0	0	0	45	22,5
Pasien Lama	0	0	0	0	0	0	155	77,5
Jumlah Responden	0	0	0	0	0	0	200	100

Tabel 3.5 mendeskripsikan bahwa seluruh pasien lama dan pasien baru menyatakan tidak pernah memberikan tanda terima kasih kepada petugas maupun dokter atas pelayanan yang telah diberikan oleh RSJD Atma Husada Mahakam Samarinda (meskipun tidak diminta), baik dalam bentuk barang ataupun uang.

3. Persepsi Terhadap Adanya Oknum-Oknum Petugas Melakukan Praktek Korupsi

Tabel 3.6 mendeskripsikan distribusi persepsi masyarakat pengguna layanan kesehatan mengenai adanya oknum-oknum petugas melakukan praktek korupsi menurut jenis pasien:

Tabel 3.6 Distribusi masyarakat pengguna layanan kesehatan berdasarkan pengalaman pernah mendapatkan informasi dari teman/ kerabat yang menyatakan bahwa di RSJD Atma Husada Mahakam terdapat oknum-oknum petugas yang melakukan praktek korupsi

Jenis Pasien	Pendapat							
	Selalu	%	Pernah Beberapa Kali	%	Pernah Sekali	%	Tidak Pernah	%
Pasien Baru	0	0	0	0	0	0	45	22,5
Pasien Lama	0	0	0	0	0	0	155	77,5
Jumlah Responden	0	0	0	0	0	0	200	100

Menggambarkan bahwa seluruh masyarakat pengguna layanan kesehatan baik pasien lama maupun pasien baru menyatakan tidak pernah mendapatkan informasi terkait oknum-oknum petugas yang melakukan praktek korupsi di RSJD Atma Husada Mahakam selama mereka memanfaatkan pelayanan.

4. Persepsi Terhadap Imbalan Diluar Ketentuan Rumah Sakit

Berikut merupakan distribusi persepsi masyarakat pengguna layanan kesehatan mengenai adanya petugas menerima/ meminta imbalan di luar ketentuan yang berlaku menurut jenis pasien:

Tabel 3.7 Distribusi masyarakat pengguna layanan kesehatan berdasarkan pengalaman pernah petugas menerima/meminta imbalan untuk alasan administrasi, rokok dll di luar ketentuan yang berlaku pada unit layanan RSJD Atma Husada Mahakam

Jenis Pasien	Pendapat							
	Selalu	%	Pernah Beberapa Kali	%	Pernah Sekali	%	Tidak Pernah	%
Pasien Baru	0	0	0	0	0	0	45	22,5
Pasien Lama	0	0	0	0	0	0	155	77,5
Jumlah Responden	0	0	0	0	0	0	200	100

Tabel 3.7 Memperlihatkan bahwa seluruh pasien baik pasien lama maupun baru semua berpendapat tidak pernah mendapatkan petugas

menerima atau meminta imbalan yang diluar dari ketentuan yang telah berlaku pada seluruh unit layanan di RSJD Atma Husada Mahakam.

5. Persepsi Terhadap Pengalaman Pernah Dipersulit Oleh Petugas Meskipun Persyaratan Layanan Telah Terpenuhi

Berikut merupakan distribusi persepsi masyarakat pengguna layanan kesehatan mengenai pernah mendapatkan pengalaman dipersulit oleh petugas meskipun persyaratan layanan telah terpenuhi menurut jenis pasien:

Tabel 3.8 Distribusi masyarakat pengguna layanan kesehatan berdasarkan pengalaman pernah dipersulit oleh petugas RSJD Atma Husada Mahakam

Jenis Pasien	Pendapat							
	Selalu	%	Pernah Beberapa Kali	%	Pernah Sekali	%	Tidak Pernah	%
Pasien Baru	0	0	0	0	0	0	45	22,5
Pasien Lama	0	0	0	0	0	0	155	77,5
Jumlah Responden	0	0	0	0	0	0	200	100

Tabel 3.8 mengindikasikan bahwa seluruh pasien lama maupun baru tidak pernah memiliki pengalaman dimana pernah dipersulit di RSJD Atma Husada Mahakam Samarinda.

6. Persepsi Terhadap Pemberian Layanan Diluar Prosedur/Kecurangan Pelayanan

Berikut adalah sebaran jawaban masyarakat pengguna layanan kesehatan mengenai pemberian layanan diluar prosedur/ kecurangan pelayanan menurut jenis pasien:

Tabel 3.9 Distribusi masyarakat pengguna layanan kesehatan berdasarkan pengalaman pernah mendapatkan petugas RSJD Atma Husada Mahakam memberikan pelayanan diluar prosedur/ kecurangan pelayanan

Jenis Pasien	Pendapat							
	Selalu	%	Pernah Beberapa Kali	%	Pernah Sekali	%	Tidak Pernah	%
Pasien Baru	0	0	0	0	0	0	45	22,5
Pasien Lama	0	0	0	0	0	0	155	77,5
Jumlah Responden	0	0	0	0	0	0	200	100

Tabel 3.9 menggambarkan bahwa seluruh masyarakat pengguna layanan kesehatan menyatakan tidak pernah mendapatkan pengalaman bahwa petugas RSJD Atma Husada Mahakam memberikan pelayanan diluar prosedur pada seluruh unit rumah sakit.

7. Persepsi Terhadap Praktek Percaloan Di RSJD Atma Husada Mahakam

Berikut adalah sebaran jawaban masyarakat mengenai adanya praktek percaloan menurut jenis pasien:

Tabel 3.10 Distribusi masyarakat pengguna layanan kesehatan berdasarkan pengalaman Dalam proses pelayanan di RSJD Atma Husada Mahakam terdapat praktek percaloan/ perantara tidak resmi pada unit layanan RSJD Atma Husada Mahakam

Jenis Pasien	Pendapat							
	Selalu	%	Pernah Beberapa Kali	%	Pernah Sekali	%	Tidak Pernah	%
Pasien Baru	0	0	0	0	0	0	45	22,5
Pasien Lama	0	0	0	0	0	0	155	77,5
Jumlah Responden	0	0	0	0	0	0	200	100

Tabel 3.10 memperlihatkan bahwa pasien lama maupun pasien baru tidak pernah mendapatkan praktek percaloan di RSJD Atma Husada Mahakam.

8. Persepsi Kesesuaian Antara Produk/ Layanan Diterima Dengan Yang Diminta

Berikut adalah sebaran jawaban masyarakat pengguna layanan kesehatan mengenai pengalaman mendapatkan kesesuaian layanan diterima dengan yang diminta menurut jenis pasien:

Tabel 3.11 Distribusi masyarakat pengguna layanan kesehatan berdasarkan pengalaman/ jasa layanan yang diterima tidak sesuai dengan daftar produk jasa layanan yang tersedia/ diminta

Jenis Pasien	Pendapat							
	Selalu	%	Pernah Beberapa Kali	%	Pernah Sekali	%	Tidak Pernah	%
Pasien Baru	0	0	0	0	0	0	45	22,5
Pasien Lama	0	0	0	0	0	0	155	77,5
Jumlah Responden	0	0	0	0	0	0	200	100

Tabel 3.11 menggambarkan seluruh pasien lama dan baru menyatakan tidak pernah mendapatkan pelayanan yang tidak sesuai dengan yang mereka inginkan selama memanfaatkan pelayanan di RSJD Atma Husada Mahakam.

9. Persepsi Terhadap Petugas Bekerja Tanpa Membedakan Pasien/ Keluarga Pasien

Berikut adalah sebaran jawaban masyarakat pengguna layanan kesehatan mengenai petugas bekerja tanpa membedakan pasien/ keluarga pasien menurut jenis pasien:

Tabel 3.12 Distribusi masyarakat pengguna layanan kesehatan berdasarkan pengalaman petugas memberikan pelayanan secara khusus/ membeda-bedakan pelayanan (faktor suku, agama dll)

Jenis Pasien	Pendapat							
	Selalu	%	Pernah Beberapa Kali	%	Pernah Sekali	%	Tidak Pernah	%
Pasien Baru	0	0	0	0	0	0	45	22,5
Pasien Lama	0	0	0	0	0	0	155	77,5
Jumlah Responden	0	0	0	0	0	0	200	100

Tabel 3.11 menemukan bahwa tidak pernah ada masyarakat yang mendapatkan petugas membeda-bedakan pelayanan selama mereka berobat di RSJD Atma Husada Mahakam.

10. Persepsi Terhadap Pengalaman Membayar Sejumlah Uang Selain Pembayaran Di Kasir

Berikut adalah sebaran jawaban masyarakat pengguna layanan kesehatan mengenai pengalaman pernah membayar sejumlah uang selain pembayaran dikasir menurut jenis pasien:

Tabel 3.13 Distribusi masyarakat pengguna layanan kesehatan berdasarkan pengalaman pernah membayar sejumlah uang selain pembayaran di kasir RSJD Atma Husada Mahakam

Jenis Pasien	Pendapat							
	Selalu	%	Pernah Beberapa Kali	%	Pernah Sekali	%	Tidak Pernah	%
Pasien Baru	0	0	0	0	0	0	45	22,5
Pasien Lama	0	0	0	0	0	0	155	77,5
Jumlah Responden	0	0	0	0	0	0	200	100

Tabel 3.13 mendeskripsikan bahwa seluruh masyarakat pengguna layanan kesehatan tidak pernah menyatakan pernah membayar sejumlah uang selain pembayaran resmi di kasir RSJD Atma Husada Mahakam.

11. Persepsi Terhadap Petugas Memberikan Perlakuan Istimewa (Tanpa Mengantri)

Berikut adalah sebaran jawaban masyarakat pengguna layanan kesehatan mengenai pengalaman petugas pernah memberikan perlakuan istimewa (tanpa mengantri) menurut jenis pasien:

Tabel 3.14 Distribusi Masyarakat pengguna layanan kesehatan Berdasarkan pengalaman Dokter/ perawat/ petugas kesehatan di RSJD Atma Husada Mahakam pernah membiarkan teman/kerabatnya mendapatkan pelayanan tanpa mengantri

Jenis Pasien	Pendapat							
	Selalu	%	Pernah Beberapa Kali	%	Pernah Sekali	%	Tidak Pernah	%
Pasien Baru	0	0	0	0	0	0	45	22,5
Pasien Lama	0	0	0	0	2	1	153	76,5
Jumlah Responden	0	0	0	0	2	1	198	99

Tabel 3.14 mengindikasikan bahwa terdapat dua pasien lama yang pernah sekali memiliki pengalaman dimana petugas memberikan perlakuan khusus kepada teman/ kerabatnya tanpa mengantri.

12. Persepsi Terhadap Kegiatan Pengutan Liar Di RSJD Atma Husada Mahakam

Berikut adalah sebaran jawaban masyarakat pengguna layanan kesehatan mengenai pengalaman pernah mendapatkan kegiatan pungli di sekitar rumah sakit menurut jenis pasien:

Tabel 3.15 Distribusi masyarakat pengguna layanan kesehatan berdasarkan pengalaman di RSJD Atma Husada Mahakam terdapat pungutan liar (pungli)

Jenis Pasien	Pendapat							
	Selalu	%	Pernah Beberapa Kali	%	Pernah Sekali	%	Tidak Pernah	%
Pasien Baru	0	0	0	0	0	0	45	22,5
Pasien Lama	0	0	0	0	0	0	155	77,5

Jumlah Responden	0	0	0	0	0	0	200	100
-------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	------------	------------

Tabel 3.15 memperlihatkan bahwa seluruh masyarakat pengguna layanan kesehatan baik merupakan pasien lama maupun pasien baru menyatakan tidak pernah mendapatkan adanya pungutan liar di RSJD Atma Husada Mahakam

13. Persepsi Terhadap Adanya Biaya Tambahan Untuk Keperluan Rumah Sakit

Berikut adalah sebaran jawaban masyarakat pengguna layanan kesehatan mengenai pernah mengeluarkan biaya tambahan untuk keperluan rumah menurut jenis pasien:

Tabel 3.16 Distribusi masyarakat pengguna layanan kesehatan berdasarkan pengalaman pernah ditawarkan membayar sejumlah uang tambahan untuk membeli alat kesehatan dan obat diluar pelayanan yang diberikan petugas dan tidak dibayarkan di kasir

Jenis Pasien	Pendapat							
	Selalu	%	Pernah Beberapa Kali	%	Pernah Sekali	%	Tidak Pernah	%
Pasien Baru	0	0	0	0	0	0	45	22,5
Pasien Lama	0	0	0	0	0	0	155	77,5
Jumlah Responden	0	0	0	0	0	0	200	100

Pada tabel 3.16 ditemukan bahwa tidak terdapat pasien lama maupun pasien baru yang mengeluarkan biaya tambahan untuk keperluan rumah sakit yang tidak dibayarkan di kasir selama mereka berobat di RSJD Atma Husada Mahakam.

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1. Pembahasan

Penilaian indeks persepsi korupsi dilakukan berdasarkan survei terhadap penerima pelayanan pengguna pelayanan yaitu pasien atau keluarga pasien publik bidang kesehatan dalam hal ini di RSJD Atma Husada Mahakam masyarakat. IPK memiliki skala 0 sampai 100% dalam hal ini diukur dengan 13 pertanyaan. IPK merupakan komitmen yang mengacu kepada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan instansi pemerintah. Hasil perhitungan Indeks Persepsi Korupsi (IPK), diperoleh nilai RSJD Atma Husada Mahakam tahun 2024 sebesar 12.999 atau dalam skala 0-100% mencapai 99.99%. Hasil ini menggambarkan bahwa di lingkungan RSJD Atma Husada Mahakam tahun 2024 hampir mencapai bersih dari tindakan korupsi menurut penilaian dari masyarakat (kurang 0,001 poin mencapai 100%).

Persepsi korupsi ditinjau dari 13 unsur, diperoleh nilai Indeks Persepsi korupsi telah mencapai 12.999, yang menandakan bahwa persepsi korupsi di RSJD Atma Husada Mahakam dianggap hampir tidak ada indikasi korupsi berdasarkan pengalaman masyarakat. Tiga belas unsur mencapai IPK tertinggi atau nilai sempurna tanpa indikasi praktik korupsi. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya pencapaian inisedikit mengalami kenaikan dari persentase unsurnya.

Berbagai program serta Upaya yang dilakukan RSJD Atma Husada Mahakam memperlihatkan hasil yang berdampak positif. Tanggapan masyarakat yang menyatakan terdapat pengalaman dalam memberikan terima kasih ternyata merupakan pengalaman dengan memberikan apresiasi dalam bentuk verbal seperti kutipan berikut :

“Pelayanan memuaskan” (J, Perempuan, 32 tahun).

“Selama saya berkunjung di RS ini dari pelayanan sampai mendapatkan tindakan medis sudah sangat baik sekali. sukses selalu RSJD Atma Husada.” (S, Laki-laki, 73 Tahun).

Prinsip-prinsip pelayanan prima terutama dalam perihal pemberian dapat dikomunikasikan dengan bahasa yang beretika. Bahasa beretika merupakan bagian dari “assurance” yaitu bahasa santun, bahasa dengan pilihan kata sesuai dengan status lawan bicara. Lawan bicara dalam kaitan dengan pelayanan prima adalah tamu yang layak dihormati tanpa diskriminasi. Bahasa berkaitan dengan norma-norma sosial yang berlaku dalam masyarakat bahasa yang bersangkutan. Norma-norma di dalam masyarakat suatu bahasa menentukan pilihan kata dalam berkomunikasi. Pilihan kata tersebut didasarkan pada (1) siapa berbicara dengan siapa, (2) bagaimana situasi pembicaraan, (3) apa materi pembicaraan, (4) media apa yang digunakan, (5) kapan waktu berbicara, dan (6) di mana tempat berbicara. Bahasa beretika dalam pelayanan publik digunakan dalam semua bidang pelayanan, yaitu ketika menyapa tamu, ketika bersurat, dan ketika bertelepon atau menjawab email. Prinsip ini seyogyanya selalu dipraktikkan oleh segenap pemberi pelayanan di RSJD Atma Husada Mahakam.

Untuk menghindari kesalahpahaman dari masyarakat seyogyanya petugas senantiasa menyampaikan atau mengkomunikasikan setelah membantu seperti, *“Dengan senang hati jika kami dapat dapat membantu Bapak/Ibu”*, *“Sudah kewajiban kami membantu Bapak/Ibu”*. Meskipun terdengar umum, menggunakan kata-kata seperti "senang" atau "bahagia" sesekali bisa menjadi positif dan menjadi pengalaman yang baik bagi masyarakat.

Upaya peningkatan profesionalisme para pelaksana pelayanan publik di RSJD Atma Husada Mahakam penting untuk terus di perbaharui melalui pelatihan berkala untuk semakin meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) penyelenggara layanan. Pemberian penghargaan/ reward juga penting untuk kontinyu diberikan agar mendorong kreativitas dan inovasi para pegawai dalam memberikan pelayanan. Selanjutnya pada

persepsi masyarakat bahwa terdapat indikasi dokter/ perawat/ petugas kesehatan di RSJD Atma Husada Mahakam pernah membiarkan teman/kerabatnya mendapatkan pelayanan tanpa mengantri, terdapat beberapa kutipan berikut :

“Terkadang no panggilan di ruang dokter tidak berurutan atau tidak sesuai dengan nomor antrian ketika pendaftaran ulang. Sehingga sering membuat pasien agak Cukup nyaman krn terkadang pasien dgn nomor antrian rendah dipanggil belakangan, dan no antrian pasien yg lebih tinggi kdng dipanggil lebih awal.” (A, Perempuan, 41 tahun).

*“Rekrut perawat lagi, biar kinerja dalam sistem antrian lebih cepat dan bisa sesuai urutan hehehe sukses dan jaya selalu AHM.”**M, Laki-laki, 17 Tahun.

Pengalaman yang disampaikan oleh masyarakat tersebut salah satunya merupakan kondisi darurat yang dapat dilakukan dengan komunikasi dan penjelasan kepada pasien lainnya agar tidak menimbulkan kesalahpahaman bahwa “pasien didahulukan/ tidak mengantri karena kondisi yang membutuhkan penanganan cepat.”

4.2. Tindak Lanjut Survei

Dari hasil penilaian survei IPK yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam Samarinda Provinsi Kalimantan Timur Sampai dengan dibuatnya laporan ini, ada beberapa upaya tindak lanjut yang telah dilakukan dan ada pula yang masih dalam rencana tindak lanjut. Hal ini dikarenakan adanya beberapa kendala, baik kendala teknis maupun non teknis. Upaya tindak lanjut untuk masing-masing saran perbaikan tersebut yaitu :

1. Unsur: Petugas Memberikan Perlakuan Istimewa / Tanpa Mengantri

Hasil Survei IPK :

- a. Pada hasil Survei tidak ada atau tidak ditemukannya pelayanan yang memperlakukan Istimewa terhadap keluarga/kerabat

petugas karena sebagian besar petugas melayani pasien sesuai standar operasional yang telah ditetapkan.

Rencana Tindak Lanjut :

- a. Memberikan arahan dan informasi kepada seluruh pengguna layanan di Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam Samarinda Provinsi Kalimantan Timur untuk menuliskan atau menyampaikan dengan jelas jika ditemukan hal hal yang berhubungan dengan kurang puas pelayanan yang diberikan ke unit pengaduan dan informasi atau menghubungi *hotline service*.

Tindak Lanjut :

- a. Telah melakukan koordinasi dengan Pusat Informasi dan Pengaduan Layanan dan para pihak lain yang dianggap perlu untuk membantu mengawasi jika pada pelayanan ditemukan hal hal lain yang berhubungan dengan perlakuan istimewa petugas kepada pihak tertentu.

BAB V

KESIMPULAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengumpulan data Indeks Persepsi Korupsi di Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD) Atma Husada Mahakam, maka didapatkan hasil yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Nilai Indeks Persepsi Korupsi (IPK) di RSJD Atma Husada Mahakam tahun 2024 secara keseluruhan yaitu telah memenuhi 99.99% atau dengan skor 12,999 (skala maksimal 13), dapat diinterpretasikan sangat bersih dari korupsi.
2. Ditemukan seluruh unsur (total 13 unsur) yang memiliki nilai IPK tinggi atau mencapai skor 4.00 meliputi: (1) Tidak terdapat Budaya praktek korupsi, (2) Tidak memiliki pengalaman memberikan tanda terima kasih kepada petugas, (3) Tidak terdapat informasi adanya oknum-oknum yang melakukan praktek korupsi, (4) Tidak menerima/ meminta imbalan di luar ketentuan yang berlaku, (5) Tidak pernah dipersulit oleh petugas terkait persyaratan layanan, (6) Tidak adanya pelayanan diluar prosedur/ kecurangan pelayanan, (7) Tidak terdapat Praktek Percaloan, (8) Kesesuaian produk layanan / Layanan Diterima Dengan Yang Diminta, (9) Petugas bekerja tanpa membedakan pasien/ keluarga pasien, (10) Tidak ada keharusan membayar sejumlah uang selain pembayaran dikasir, (11) Petugas tidak memberikan perlakuan istimewa / tanpa mengantri, (12) Tidak adanya kegiatan pungutan liar (Pungli), (13) Tidak adanya Biaya Tambahan Untuk Keperluan Rumah Sakit
3. Terdapat satu unsur yang menemukan adanya Tindakan yang mengindikasikan perbuatan korupsi, yaitu : unsur Persepsi terhadap petugas memberikan perlakuan istimewa (tanpa mengantri) dimana ditemukan 2 orang pasien lama yang merasakan perlakuan Istimewa pada saat mengantri di RSJD Atma Husada Mahakam.

5.2. Rekomendasi

Rekomendasi yang didasarkan temuan hasil Indeks Persepsi Korupsi guna meningkatkan dan mempertahankan kualitas pelayanan yang ada di RSJD Atma Husada Mahakam yaitu sebagai berikut :

1. Selalu menerapkan praktik pelayanan prima dalam berkomunikasi dengan masyarakat di RSJD Atma Husada Mahakam termasuk pada saat menolak pemberian dari masyarakat.
2. Meningkatkan profesionalisme para pelaksana pelayanan publik di RSJD Atma Husada Mahakam yang terus diperbaharui melalui pelatihan berkala untuk semakin meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) penyelenggara layanan. Pemberian penghargaan/ reward juga penting secara kontinyu diberikan agar mendorong kreativitas dan inovasi para pegawai dalam memberikan pelayanan.
3. Melakukan komunikasi yang baik kepada pasien dan keluarganya jika terdapat obat-obatan dengan merek tertentu yang tidak tersedia di fasilitas kesehatan yang harus dibeli dari luar RSJD Atma Husada Mahakam. Pasien dan keluarga diharapkan memperoleh informasi dengan jelas terkait hal tersebut sehingga dapat memutuskan untuk setuju atau tidak jika harus membeli obat dari luar RSJD Atma Husada Mahakam. Selanjutnya sebagai penyedia layanan kesehatan seperti dokter atau tenaga medis tetap harus menawarkan obat-obatan yang ditanggung dan tersedia di lembaga pelayanan kesehatan. Hal tersebut diharapkan dapat mengurangi mispersepsi dari pasien.

LAMPIRAN

1. Hasil Survei IPK

RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024

NILAI IPK	NAMA LAYANAN Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam
12,999	RESPONDEN JUMLAH : 200 Orang JENIS KELAMIN : L = 71 Orang / P = 129 Orang PENDIDIKAN : Tidak Sekolah = 19 Orang SD = 18 Orang SMP = 16 Orang SMA = 86 Orang Diploma = 19 Orang Sarjana = 39 Orang Pascasarjana = 3 Orang PASIEN : Lama = 155 Orang Baru = 45 Orang Periode 01 Januari s.d 31 Desember 2024

TERIMA KASIH ATAS PENILAIAN YANG TELAH ANDA BERIKAN
MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT UNTUK KEMAJUAN UNIT
KAMI AGAR TERUS MEMPERBAIKI DAN MENINGKATKAN KUALITAS
PELAYANAN BAGI MASYARAKAT

Samarinda, 28 Juni 2024

Direktur,



dr. Indah Puspitasari, MARS

Pembina Utama Muda

NIP. 196705301998032003

2. Tim Survei Internal



**KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT JiWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM
NOMOR 100.3.3/389/RSJD AHM-TU/2024
TENTANG
TIM SURVEY INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)
DAN INDEKS PERSEPSI KORUPSI (IPK)
PADA RUMAH SAKIT JiWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM**

DIREKTUR RUMAH SAKIT JiWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melakukan pengukuran indikator kepuasan masyarakat dan Indeks Persepsi Korupsi melalui survei terhadap pengguna Layanan rumah sakit perlu dibentuk Tim Survey Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Persepsi Korupsi ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Tim Survei Ineks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Persepsi Korupsi di lingkungan Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat;
4. Peraturan Gubernur 18 Tahun 2013 Pedoman Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG TIM SURVEY INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT DAN INDEKS PERSEPSI KORUPSI PADA RUMAH SAKIT JiWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM.
- KEDUA : Tim yang dimaksud sebagaimana diktum kesatu terlampir pada keputusan ini;
- KETIGA : Tim yang dimaksud pada diktum kedua melaksanakan tugasnya sesuai dengan Peraturan dan perundang – undangan;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 26 Februari 2024
Direktur,

dr. Indah Puspitasari, MARS
Pembina Utama Muda
NIP. 19670530 199803 2 003

Lampiran.....(2).



Lampiran

Keputusan Direktur

Nomor 188.4 /389/RSJD AHM-TU/2024

Tentang Tim Survey Indeks Kepuasan

Masyarakat dan Indeks Persepsi Korupsi

**SUSUNAN TIM SURVEY INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT
DAN INDEKS PERSEPSI KORUPSI
PADA RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM**

Pelindung : Direktur
Pengarah : Wadir Umum dan Keuangan
Ketua : Moh. Walid Arkham Sani,A.Md.Pnl
Sekretaris : Dhea Ananda Aryanti, SKM
Anggota : 1. Fatmawati, A.Md.kep
2. Didik Tri Pratama, SE
3. Umi Kalsum,A.Md.Kep
4. Melly Putri Dema, A.Md.Kep
5. Destryarini Miranda, S.Psi
6. Putri Safariani, S.IP
7. Dinda Ika Paramitha, S.Pd
8. Eri Permana Sastrawardaya, S.Pd

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 26 Februari 2024
Direktur,



dr. Indah Puspitasari, MARS
Pembina Utama Muda
NIP. 19670530 199803 2 003

3. Kuesioner IPK

The image shows a screenshot of a Google Forms survey. The browser address bar at the top displays the URL: <https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1SxkUO6WXvn6re4SOKY3vALvcbfkje3cywgGUOSmQ1>. The survey title is "C. SURVEI PERSEPSI KORUPSI" and the instruction is "Silakan isi berdasarkan pengalaman Bapak/Ibu/Sdr." There are two questions, both marked with a red asterisk (*).

C. SURVEI PERSEPSI KORUPSI
Silakan isi berdasarkan pengalaman Bapak/Ibu/Sdr.

1. Berdasarkan pengalaman Bapak/Ibu/Sdr RSJD Atma Husada Mahakam terdapat budaya dan praktek korupsi dalam pelayanan kesehatan *

- Selalu
- Pernah Beberapa Kali
- Pernah Sekali
- Tidak Pernah

2. Berdasarkan pengalaman Bapak/Ibu/Sdr pernah memberikan tanda terima kasih atas pelayanan yang telah diselesaikan oleh RSJD Atma Husada Mahakam (meskipun tidak diminta) baik dalam bentuk barang ataupun uang *

- Selalu
- Pernah Beberapa Kali

4. Dokumentasi Terkait Pelaksanaan IPK

